

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir. Bakti, 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Zaeni Syahdie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.
- Hartini, Rahayu. 2017. *Hukum Kepailitan: Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: UMM Press.
- Ibragim, J. 2007. *Teori & metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud, Peter, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

R Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Jakarta: Pradnya Paramita

Rastuti Tuti. 2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka

Yustisia

Sastrawidjaja H. Man Suparman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat*

Berharga, Bandung: PT Alumni

Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban*

Pembayaran Utang : Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Dan UU No. 4

Tahun 1998 (Suatu Perbandingan). Bandung: Alumni.

Sentosa Sembiring. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.

Shubhan, Hadi. 2015. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di*

Peradilan, Jakarta: Kencana

Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta:

Prenadamedia Group

Jurnal

Alex Sandro, "Asas Pembuktian Secara Sederhana Dalam Permohonan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan MARI

No. 586 K/Pdt.Sus-Pailit/2013". (Repositori USU : Medan, 2015).

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata".

Jurnal Mimbar Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara.

vol. 21 no. 2. Medan. 2009.

Husain, Fajrin. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut

UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 6,

2016.

- Juliantini, N. N., Arjaya, I. M., & Widiati, I. A. P. 2021. Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pkpu/2010/Pn. Niaga.Sby). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 101-105
- Marcella, Cloudiya. "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016): 1-13
- Nur Agus Susanto. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor97/PK/Pid.SUS/2012." *Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia*. vol.7 no. 3. Jakarta. 2014.
- Nurul Alfaruni Safitri, Rahadi Wasi Bintoro, Dan Sanyoto, "Upaya Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan Tentang Pembatalan Homologasi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2018/Pn Niaga Sby Jo Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2019)". *Jurnal Universitas Jenderal Soedirman* 2(2).
- Syahmi, Afika Yumya. "Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok. 2004.
- Sigalingging, Bisdan. "Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia." *USU Law Journal*, vol. 1. no. 1. 2013. 14185.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3467)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5253)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5618)

Wawancara

Wawancara dengan Agus Pancara, S.H., Mhum. selaku Hakim Pengadilan Negeri
Banyuwangi pada 27 April 2022 pukul 20.10 WIB melalui telepon.

Wawancara dengan Khusaini SH. MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya pada 23 Mei 2022 pukul 10.30 WIB.